

## Analysis Of The Effect Of Regional Original Income, Profit-Sharing Funds, General Allocation Funds, And Special Allocation Funds, Capital Expenditures And Silpa On Human Development Index (Study Of Regency And City Governments Throughout Central Java Province Fiscal Year 2016-2019)

Agung Jasiyantanto<sup>1</sup>, Mujiyati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departement of Economy and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Departement of Economy and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 <sup>1</sup> [B200170270@student.ums.ac.id](mailto:B200170270@student.ums.ac.id), <sup>2</sup> [mujiyati@ums.ac.id](mailto:mujiyati@ums.ac.id)

### **Abstract**

*The human development index is one indicator to measure the success of a country's development. The purpose of this study is to analyze several factors that affect the human development index in the districts/cities in the province of Central Java. The data used in this study were all districts/cities in the province of Central Java for a period of 4 years. This data uses a saturated sample. The analysis method used is multiple linear regression. The population in this study is a report on the realization of the APBD of all regencies/cities of Central Java Province in 2016-2019 while the samples are all regencies/cities of Central Java Province in 2016-2019. Based on the results of the study, it is known that Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Capital Expenditures have an effect on the Human Development Index (IPM). Meanwhile, the Revenue Sharing Fund (DBH), the Special Allocation Fund (DAK), and SILPA have no effect on the Human Development Index.*

**Keywords:** *Local Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, SILPA Development Index.*

## Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal Dan Silpa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2019)

### **Abstrak**

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di kab/kota di prov Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kab/kota di provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun. Data ini menggunakan sampel jenuh. Metode yang analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019 sedangkan sampelnya seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, SILPA Indeks Pembangunan.

## 1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan upaya pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita [1] Menurut UNDP (2004) IPM merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah yang diukur berdasarkan tiga acuan, yakni panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli, pendapatan perkapita)[1].

Dengan ini IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) di suatu wilayah (BPS, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerintaan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia [2].

Penelitian tentang Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang telah dilakukan beberapa peneliti [3] hasil penelitian menunjukkan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD, DAU dan DAK melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan IPM di Kabupaten Sinjai. Hal ini IPM merupakan satu ukuran yang dapat mencerminkan aspek-aspek pembangunan dan dianggap cukup baik untuk menggambarkan aspek sosial maupun ekonomi yang telah dicapai oleh suatu daerah. IPM Kab Sinjai sedikit mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2009

[4] meneliti PAD, DAU berpengaruh positif IPM dan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Hasil tersebut menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan demikian semakin tinggi PAD dan DAU maka semakin tinggi pula IPM, yang mana dana yang bersumber dari pendapatan APBN dapat dialokasikan dengan tujuan pemerataan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

[5] PAD, DAU, dan DBH dalam membiayai Belanja Modal tidak mempengaruhi capaian IPM. Namun Dana Alokasi Khusus menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif pada IPM. Penelitian Lestari, Sarfiah dan Prasetyanto (2017) DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif terhadap IPM dan DAK dan DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. Penelitian Hanantoko (2020) PAD, DBH, DAU dan Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM. Penelitian [6] menyatakan DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan dari penelitian kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing tidak sama, maka menyebabkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, dimana pemerintah harus berupaya untuk menanggulangi ketimpangan fiskal tersebut dengan cara pengalokasian dana yang tepat yang bersumber dari APBN untuk membiayai keperluan daerah demi menunjang pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah.

[7] DAU, DAK DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini membuktikan bahwa sektor-sektor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap peningkatan IPM ialah sektor yang mengurangi kesejangan yaitu sektor perdagangan, tenaga kerja dan industri.

Sudah banyaknya penelitian yang mengkaji tentang Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia suatu proses untuk meningkatkan aspek kehidupan manusia, dalam pencapaian tujuan pembangunan manusia selalu menekankan pada pemenuhan tujuan yaitu pendidikan universal, peningkatan kesehatan dan pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dalam hasil penelitiannya maka penulis tertarik mengambil judul tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal Dan Silpa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2019).

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. Untuk mengetahui pengaruh SILPA terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019

## 2. Literatur Riview

### Pengembangan Hipotesis

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019**

Halim (2004) dalam (Widyasari, 2013) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah

otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 34/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan [4]. Penelitian (Putra, 2015) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan demikian semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula IPM, yang mana dana yang bersumber dari pendapatan APBN dapat dialokasikan dengan tujuan pemerataan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Wandira, 2013). Sebagai salah satu komponen dari Dana Perimbangan, DBH yang bersumber dari APBN dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, DBH ditujukan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk penyediaan infrastruktur yang berkenaan dengan potensi tersebut melalui belanja modal. Penelitian (Hartati, 2016) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengelurannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan yang tidak penting [8] dalam [4]. Oleh karena itu penggunaan dana ini diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah. Jika kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan berhasil pula. Penelitian [2] menunjukkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Penggunaan DAK pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah karena DAK merupakan bagian dari APBD. Meskipun demikian, dengan alasan agar penggunaan DAK oleh pemda sesuai dengan kepentingan nasional, pemerintah pusat mengatur penggunaan DAK melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis. Sejak pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pada 2001, cakupan sektor bidang atau kegiatan yang dibiayai oleh DAK bertambah banyak. Penelitian [9] menunjukkan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja modal merupakan belanja pemerintah area memiliki manfaat meliputi satu tahun dana serta dapat memperbanyak asset ataupun modal wilayah sehingga mampu memperbanyak belanja yang karakterinya teratur seperti dan perlindungan demi gabungan belanja administrasi umum. Belanja modal difungsikan demi pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berdampak dalam aktivitas ekonomi suatu daerah dan nantinya akan menimbulkan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian [5] menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan

signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H5 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adaah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama periode laporan (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Penelitian Febriana (2017) menunjukkan Silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H6 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala *numeric* (angka) yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Metode kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan dalam penelitian dengan populasi atau sampel tertentu, dalam pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis datanya bersifat kuantitatif/statistik dalam menguji hipotesis yang sudah ditetapkan [1].

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2019. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi [9]. Sampel yang diambil adalah daerah yang melaporkan informasi secara lengkap di laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019 di Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode nonprobabilitas atau secara tidak acak, elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Pemilihan sampel berdasarkan sampel jenuh yang mana metode ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel (Sugiyono, 2010).

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah modal kerja, intellectual capital, transaksi hubungan istimewa dan ukuran perusahaan. Definisi dan pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Variabel Dependen

IPM adalah ukuran pencapaian pembangunan didasarkan sejumlah komponen dasar dari kualitas hidup (BPS, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM. IPM diukur dengan rumus :

$$IPM = Indeks (AHH + P + PPP)$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

AHH = Indeks Angka Harapan Hidup

P = Indeks Pendidikan

PPP = Indeks Purchasing Parity Power

##### 2. Variabel Independen

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi pada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku [10]
- b. Dana Alokasi Umum (DAU). DAU yang bersumber dari pusat merupakan pengalokasian dana dengan tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi [7].
- c. Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangk apelaksanaan desentralisasi [6]

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang telah ditetapkan pada APBN. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 40 menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan tiga kriteria dalam penentuan DAK, yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
- e. Belanja Modal (BM). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dialokasikan untuk menampung seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya).
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi. Perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, uji analisis linier berganda, dan regresi sederhana serta uji hipotesis. Penelitian ini terdapat satu persamaan yang akan diuji, berikut persamaanya:

$$IPM = a + b_1PAD + b_2DBH + b_3DAU + b_4DAK + b_5BE + b_6DP + e$$

### Uji Hipotesis

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang telah diungkapkan, maka dibutuhkan pengujian hipotesis yang sesuai terkait hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (Uji F) dan secara simultan (Uji t).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Simultan (F-test)

Hasil diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 20,304 ( $20,304 > F_{tabel} 2,21$ ) dan  $p\text{-value} = 0,000$  ( $< \alpha = 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DBH, DAU, DAK, BM dan SILPA berpengaruh secara bersama-sama terhadap IPM. Hal ini juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah tepat (*fit of goodness*)

#### Uji Parsial (t-test)

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, BM dan SILPA berpengaruh secara parsial terhadap IPM. Hasil uji t ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji  $t_{test}$

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.	Standar	Keterangan
PAD	5.446	1,980	.000	0,05	H1 diterima
DBH	-.264	1,980	.793	0,05	H2 ditolak
DAU	-4.705	1,980	.000	0,05	H3 diterima
DAK	-.355	1,980	.723	0,05	H4 ditolak
BM	-2.761	1,980	.007	0,05	H5 diterima
SILPA	.603	1,980	.548	0,05	H6 ditolak

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2021.

## 4.2 Pembahasan Hasil Analisis

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,446 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,980 dan diperoleh nilai signifikansi ( $sig\ t$ ) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil ini dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang paling berkontribusi demi menunjang kemampuan daerah dalam rangka desentralisasi. Pemerintah daerah bebas menggunakan PAD dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian sebelumnya [10], [3], [4], Anim Rahmayati dan [11] [12], [2], dan [5] yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM.

### **Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,264 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,980 dan diperoleh nilai signifikansi ( $sig\ t$ ) sebesar 0,793 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,793 > 0,05$ ). Hasil ini dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dan penggunaan DBH merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan DBH untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian DBH kurang berdampak secara signifikan pada IPM. Peningkatan DBH seharusnya berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pemerintah daerah lebih banyak menggunakan DBH untuk mendanai kebutuhan masyarakat melalui alokasi belanja modal demi menunjang sarana dan prasarana publik yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

### **Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  sebesar -4,705 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar -1,980 dan diperoleh nilai signifikansi ( $sig\ t$ ) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil ini dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini ditemukan DAU tidak berpengaruh terhadap IPM hal tersebut dikarenakan DAU yang dimiliki kabupaten/kota yang dijadikan sampel penelitian lebih menggunakan DAU untuk belanja umum pegawai bukan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh terhadap IPM sangat sedikit.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,355 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar -1,980 dan diperoleh nilai signifikansi ( $sig\ t$ ) sebesar 0,723 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,723 > 0,05$ ). Hasil ini dapat dijelaskan bahwa DAK yang diterima pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal. DAK memang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

### **Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,761 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar -1,980 dan diperoleh nilai signifikansi ( $sig\ t$ ) sebesar 0,007 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,007 < 0,05$ ). Hasil ini dapat dijelaskan bahwa Belanja modal adalah jenis pengeluaran yang dilaksanakan untuk pembangunan fasilitas masyarakat. Fasilitas masyarakat akan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Anggaran belanja modal yang dilakukan sebagai sarana pembelian atau pengandaan asset tetap/tak berbentuk yang memiliki waktu fungsi kian dari 12 bulan dimanfaatkan pada aktivitas pemerintahan dan melimpahkan batas minimal. Seluruh

anggaran yang berikatan bersama pengeluaran asset bersama keperluan kian dari 12 bulan atau 1 tahun yang asal biayanya didapat lewat APBD.

### **SILPA berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

SILPA tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,603 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,980 dan diperoleh nilai signifikansi ( $sig\ t$ ) sebesar 0,548 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,548 > 0,05$ ). Hasil ini dapat dijelaskan bahwa SiLPA pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah tidak menjadi sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah karena memiliki sumber pendanaan lain seperti PAD, DAU dan DBH.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian oleh [3] menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu kurun waktu penelitian hanya 4 tahun, data penelitian hanya menggunakan variable realisasi PAD, DBH, DAU, DAK, Belanja Modal dan SILPA dari BPS. Objek penelitian hanya kabupaten/kota se provinsi Jawa Tengah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah rentan waktu penelitian.

## **Referensi**

- [1] D. M. Cut Sri Hartati, Dr.Syukri Abdullah, “Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Ace,” vol. 5, no. 2, pp. 12–23, 2016.
- [2] C. U. Sri Ramadhani, “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi dan dana bantuan pemerintah terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia,” vol. 17, no. 1, pp. 40–58, 2019.
- [3] Usnida Umar, “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN SINJAI,” vol. 7, no. 01, 2016.
- [4] R. Amalia, “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi,” 2016.
- [5] R. Hanantoko, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018,” vol. 02, no. 1, pp. 17–33, 2020.
- [6] N. Maharditya, “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia dengan pengalokasian belanja modal sebagai variable interverning,” 2018.
- [7] R. U. Harahap, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara.,” vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2017.
- [8] G. F. Williantara and I. G. A. N. Budiasih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 16, no. 3, pp. 2044-2070–2070, 2016.
- [9] P. Lestari, “DI KABUPATEN / KOTA EKS KARESIDENAN KEDU,” vol. 1, pp. 100–113, 2016.

- [10] P. gede mahendra dan i gusti ketut agung Ulupui, “Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia,” vol. 3, pp. 863–877, 2015.
- [11] I. Surakarta, “Journal of Islamic Finance and Accounting,” vol. 1, no. 1, 2018.
- [12] D. A. N. Dana, A. Khusus, and T. Indeks, “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening,” vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---